

Peningkatan Ekonomi Indonesia Berbasis Produktivitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD

www.ruduct.com/cv.pdf

RudyCT Academic Series 2026

PRODUKTIVITAS • MANUSIA • INOVASI • INKLUSI

ARTIKEL ILMIAH

Peningkatan Ekonomi Indonesia Berbasis Produktivitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Mendorong pertumbuhan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui produktivitas nasional dan penguatan kualitas SDM

8 PILAR PENINGKATAN EKONOMI

- 1  Produktivitas Tenaga Kerja
- 2  Pendidikan & Keterampilan
- 3  Kesehatan & Gizi
- 4  Digitalisasi & Inovasi
- 5  Industrialisasi & Investasi
- 6  UMKM & Kewirausahaan
- 7  Infrastruktur & Konektivitas
- 8  Tata Kelola & Reformasi

DAMPAK STRATEGIS



Produktivitas Naik
Efisiensi, output, dan nilai tambah meningkat



Daya Saing Menguat
Posisi Indonesia lebih kuat di pasar global



Lapangan Kerja Berkualitas
Pekerjaan lebih produktif, formal, dan berkelanjutan



Pertumbuhan Inklusif
Manfaat pembangunan dirasakan lebih merata

“ Dari peningkatan kualitas manusia menuju transformasi ekonomi nasional ”

Oleh: Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD



www.rudycr.com/cv.pdf



Abstrak

Peningkatan ekonomi Indonesia tidak cukup ditopang oleh akumulasi modal, ekspansi konsumsi, atau eksploitasi sumber daya alam. Dalam jangka panjang, kemampuan bangsa untuk menaikkan pendapatan per kapita ditentukan terutama oleh produktivitas: seberapa efektif tenaga kerja, modal, teknologi, organisasi, dan institusi dikombinasikan untuk menghasilkan nilai tambah. Produktivitas tersebut tidak berdiri sendiri karena kualitas sumber daya manusia merupakan penggerak utamanya. Pendidikan yang menghasilkan kemampuan dasar dan keterampilan relevan, kesehatan dan gizi yang baik, budaya belajar sepanjang hayat, kepemimpinan bermutu, serta kesempatan kerja produktif membentuk kapasitas manusia untuk menyerap teknologi, berinovasi, dan memperbaiki proses kerja. Artikel ini mengembangkan kerangka naratif-komprehensif bagi strategi peningkatan ekonomi Indonesia berbasis produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Pembahasan mencakup diagnosis pertumbuhan, transformasi struktural, produktivitas perusahaan, pendidikan, kesehatan, vokasi, pasar kerja, digitalisasi, manajemen, UMKM, industrialisasi, pertanian, ekonomi hijau, tata kelola, serta ketimpangan wilayah. Argumen utama artikel adalah bahwa bonus demografi hanya menjadi dividen apabila manusia Indonesia memperoleh kemampuan, kesehatan, insentif, institusi, dan lingkungan kerja yang memungkinkan mereka menghasilkan nilai tambah yang terus meningkat. Oleh sebab itu, agenda ekonomi perlu bergeser dari orientasi input menuju orientasi hasil: dari jumlah sekolah menuju mutu belajar, dari jumlah proyek menuju manfaat produktivitas, dari penciptaan pekerjaan apa pun menuju pekerjaan bermutu, dan dari adopsi teknologi menuju kemampuan organisasi menggunakannya secara bijaksana. Strategi ini menuntut koherensi kebijakan, pengukuran yang disiplin, kemitraan pemerintah-dunia usaha-perguruan tinggi, dan komitmen jangka panjang menuju Indonesia yang produktif, inklusif, sehat, terampil, inovatif, dan berdaya saing pada 2045.

Kata Kunci

produktivitas; kualitas sumber daya manusia; modal manusia; pendidikan; kesehatan; keterampilan; transformasi struktural; inovasi; pasar kerja; ekonomi Indonesia; Indonesia Emas 2045

Catatan Data Mutakhir

Artikel ini menggunakan data resmi yang tersedia hingga pertengahan 2026. BPS melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, dengan PDB per kapita sekitar Rp83,7 juta atau USD5.083,4. Pada triwulan I-2026, pertumbuhan tahunan tercatat 5,61 persen, walaupun ekonomi mengalami kontraksi musiman 0,77 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. IPM Indonesia pada 2025 mencapai 75,90; umur harapan hidup mencapai 74,47 tahun, harapan lama sekolah 13,30 tahun, dan rata-rata lama sekolah 9,07 tahun. Angka-angka tersebut menunjukkan kemajuan, tetapi tidak otomatis mencerminkan mutu pembelajaran, kecocokan keterampilan, kualitas pekerjaan, maupun produktivitas perusahaan. Karena data dapat direvisi, seluruh angka harus dibaca bersama tanggal rilis dan definisi statistiknya (Badan Pusat Statistik, 2025, 2026a, 2026b).

Daftar Isi

1. Pendahuluan: Dari Pertumbuhan Menuju Produktivitas
2. Produktivitas sebagai Mesin Kenaikan Pendapatan Per Kapita
3. Kualitas Sumber Daya Manusia: Dari Kuantitas ke Kapabilitas
4. Bonus Demografi dan Risiko Kehilangan Momentum
5. Mutu Pendidikan Dasar sebagai Fondasi Produktivitas Nasional
6. Pendidikan Vokasi, Perguruan Tinggi, dan Kecocokan Keterampilan
7. Kesehatan, Gizi, dan Produktivitas Sepanjang Hayat
8. Pembelajaran Sepanjang Hayat dalam Era AI dan Otomatisasi
9. Diagnosis Produktivitas Indonesia: Mengapa Pertumbuhan Belum Cukup
10. Produktivitas Perusahaan dan Kualitas Manajemen
11. Transformasi Struktural dan Industrialisasi Bernilai Tambah
12. Pasar Kerja Produktif: Fleksibilitas, Perlindungan, dan Mobilitas
13. Pendidikan dan Reformasi Modal Manusia
14. Kesehatan sebagai Infrastruktur Produktivitas
15. Infrastruktur, Logistik, dan Konektivitas Produktif
16. Digitalisasi, Data, dan Difusi Teknologi
17. UMKM, Formalisasi, dan Kenaikan Kelas Produktivitas
18. Investasi, Perdagangan, dan Pembelajaran Rantai Nilai
19. Produktivitas Pertanian dan Transformasi Perdesaan
20. Ekonomi Hijau, Energi, dan Keterampilan Masa Depan
21. Tata Kelola, Meritokrasi, dan Kapasitas Negara
22. Regulasi, Kepastian Usaha, dan Biaya Produktivitas
23. Persaingan Usaha, Inovasi, dan Disiplin Pasar
24. Kebijakan Fiskal untuk Modal Manusia dan Produktivitas
25. Desentralisasi dan Ekosistem Produktivitas Daerah
26. Sektor Keuangan dan Pembiayaan Peningkatan Kapabilitas
27. Perkotaan, Perumahan, dan Mobilitas Tenaga Kerja
28. Politik Ekonomi Produktivitas dan Keadilan Transisi
29. Strategi Implementasi: Portofolio Produktivitas dan SDM
30. Prioritas Kebijakan 2026-2030
31. Skenario Indonesia Produktif 2045
32. Kerangka Pengukuran Keberhasilan
33. Sintesis: Arsitektur Ekonomi Berbasis Produktivitas Manusia
34. Kesimpulan
35. Glossarium
36. Daftar Pustaka

1. Pendahuluan: Dari Pertumbuhan Menuju Produktivitas

Indonesia telah memperlihatkan daya tahan ekonomi yang cukup baik di tengah gejolak global, perubahan teknologi, tekanan geopolitik, dan ketidakpastian perdagangan. Namun, ketahanan tidak identik dengan transformasi. Pertumbuhan sekitar lima persen dapat menjaga ekspansi ekonomi dan mengurangi kemiskinan secara bertahap, tetapi belum tentu cukup untuk membawa pendapatan per kapita menuju tingkat negara maju pada 2045. Tantangan strategisnya adalah mengubah pola pertumbuhan berbasis penambahan input menjadi pertumbuhan berbasis peningkatan efisiensi, kemampuan, inovasi, dan nilai tambah. Dengan kata lain, pusat agenda pembangunan harus bergeser dari sekadar membesarkan ekonomi menjadi memperbaiki cara ekonomi bekerja.

Produktivitas merupakan jembatan antara sumber daya yang dimiliki dan kesejahteraan yang dihasilkan. Dua negara dapat memiliki jumlah pekerja, lahan, modal, dan teknologi yang hampir sama, tetapi menghasilkan tingkat kemakmuran berbeda karena kualitas organisasi, keterampilan, institusi, dan kemampuan belajar mereka tidak sama. Produktivitas tenaga kerja menunjukkan nilai tambah per pekerja atau per jam kerja, sedangkan produktivitas faktor total mencerminkan kemampuan mengombinasikan berbagai input secara lebih efektif. Keduanya tidak boleh dipahami sebagai tuntutan agar manusia bekerja lebih lama atau lebih keras, melainkan agar sistem kerja menghasilkan keluaran lebih bernilai dengan pemborosan lebih kecil.

Kualitas sumber daya manusia adalah fondasi utama produktivitas. Pendidikan membentuk literasi, numerasi, kemampuan memecahkan masalah, kreativitas, dan kapasitas belajar. Kesehatan dan gizi menentukan energi, konsentrasi, kehadiran, dan umur kerja produktif. Pengalaman kerja, pelatihan, serta praktik manajemen mengubah pengetahuan menjadi kompetensi nyata. Nilai-nilai seperti integritas, disiplin, kolaborasi, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab sosial juga memengaruhi kualitas keputusan. Karena itu, sumber daya manusia tidak dapat direduksi menjadi lama sekolah atau sertifikat; kualitasnya terletak pada kemampuan aktual untuk menghasilkan, beradaptasi, dan menciptakan nilai.

Artikel ini menempatkan produktivitas dan kualitas manusia sebagai satu sistem. Kualitas manusia tanpa pekerjaan produktif dapat menghasilkan pengangguran terdidik, migrasi talenta, atau frustrasi sosial. Sebaliknya, investasi dan teknologi tanpa tenaga kerja yang mampu mengoperasikan, memperbaiki, dan mengembangkannya akan menghasilkan kapasitas yang tidak terpakai. Strategi nasional harus mempertemukan sisi penawaran kemampuan dengan sisi permintaan pekerjaan bermutu. Pendidikan, industri, investasi, teknologi, kewirausahaan, dan kebijakan pasar kerja perlu bergerak dalam arah yang sama.

Kerangka tersebut menuntut perubahan ukuran keberhasilan. Pembangunan tidak cukup dinilai dari jumlah gedung sekolah, peserta pelatihan, kawasan industri, atau perangkat digital. Yang lebih penting adalah hasil belajar, peningkatan pendapatan riil, produktivitas perusahaan, formalitas kerja, mobilitas sosial, kesehatan penduduk, serta kemampuan inovasi. Dengan orientasi hasil, pemerintah dan organisasi dapat membedakan program yang sekadar menyerap anggaran dari program yang benar-benar meningkatkan kapasitas manusia dan ekonomi.

2. Produktivitas sebagai Mesin Kenaikan Pendapatan Per Kapita

Dalam teori dan pengalaman pembangunan, kenaikan pendapatan per kapita yang berkelanjutan tidak mungkin dipisahkan dari produktivitas. Akumulasi modal dapat mempercepat pertumbuhan untuk suatu periode, tetapi hasil tambahannya cenderung menurun

apabila teknologi, keterampilan, dan institusi tidak berkembang. Romer (1990) menekankan peran pengetahuan dan ide dalam pertumbuhan jangka panjang, sedangkan Lucas (1988) menunjukkan bagaimana modal manusia menciptakan efek eksternal yang meningkatkan produktivitas masyarakat. Pandangan ini relevan bagi Indonesia karena jumlah penduduk dan pasar yang besar hanya menjadi keunggulan apabila disertai kemampuan menghasilkan nilai tambah tinggi.

Produktivitas memiliki beberapa lapisan. Pada tingkat individu, produktivitas dipengaruhi oleh kesehatan, keterampilan, motivasi, alat kerja, dan kualitas supervisi. Pada tingkat perusahaan, ia dipengaruhi oleh teknologi, tata letak proses, kualitas manajemen, akses pembiayaan, skala usaha, dan jaringan pasar. Pada tingkat sektor, produktivitas meningkat ketika sumber daya berpindah dari aktivitas bernilai tambah rendah menuju aktivitas yang lebih efisien. Pada tingkat nasional, institusi, persaingan, infrastruktur, stabilitas, dan keterbukaan pembelajaran menentukan seberapa cepat inovasi menyebar.

Masalah produktivitas Indonesia tidak semata-mata disebabkan kekurangan teknologi mutakhir. Banyak peningkatan dapat diperoleh melalui praktik dasar: pengendalian mutu, pemeliharaan mesin, perencanaan persediaan, pengurangan waktu tunggu, digitalisasi pencatatan, pengembangan pekerja, dan koordinasi antarfungsi. Bloom et al. (2013) menunjukkan bahwa perbaikan praktik manajemen dapat meningkatkan produktivitas secara nyata. Implikasinya, kebijakan produktivitas harus menjangkau kemampuan organisasi, bukan hanya subsidi mesin atau insentif investasi.

Produktivitas juga berkaitan dengan alokasi sumber daya. Apabila perusahaan tidak efisien tetap bertahan karena perlindungan, koneksi, atau hambatan keluar, sementara perusahaan produktif sulit berkembang karena kredit, lahan, atau regulasi, ekonomi mengalami salah alokasi. Hsieh dan Klenow (2009) menunjukkan bahwa distorsi alokasi dapat menekan produktivitas agregat. Karena itu, peningkatan produktivitas memerlukan persaingan yang sehat, kepastian hukum, akses pasar, serta mekanisme agar modal dan tenaga kerja berpindah menuju penggunaan yang lebih bernilai.

Tujuan produktivitas harus ditempatkan dalam kerangka kesejahteraan. Peningkatan produktivitas yang hanya memperbesar keuntungan tanpa memperbaiki upah, kualitas kerja, atau layanan publik akan kehilangan legitimasi. Sebaliknya, produktivitas yang dibagi melalui upah riil, pajak yang efektif, investasi sosial, dan harga yang lebih baik dapat memperkuat kontrak sosial. Dalam kerangka ini, produktivitas bukan agenda teknokratis yang dingin, melainkan cara menciptakan ruang fiskal, pekerjaan bermutu, daya saing, dan kehidupan yang lebih layak.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia: Dari Kuantitas ke Kapabilitas

Istilah sumber daya manusia sering digunakan secara administratif, seolah-olah manusia adalah input yang dapat dihitung melalui jumlah pekerja, lulusan, atau peserta pelatihan. Pendekatan kapabilitas menuntut pandangan lebih luas: manusia adalah subjek pembangunan yang memiliki kemampuan untuk memilih, belajar, bekerja, berkreasi, dan berpartisipasi. Kualitas sumber daya manusia karena itu mencakup kesehatan fisik dan mental, pengetahuan dasar, keterampilan teknis dan sosial, karakter, kemampuan digital, serta kapasitas beradaptasi terhadap perubahan.

Indikator seperti IPM berguna untuk melihat kemajuan umum, tetapi rata-rata nasional dapat menyembunyikan kesenjangan wilayah, gender, kelas sosial, dan mutu. Lama sekolah

tidak sama dengan belajar; gelar tidak selalu berarti kompetensi; dan akses internet tidak otomatis menghasilkan literasi digital. OECD (2024a, 2024b) menyoroti perlunya meningkatkan mutu pendidikan, keterampilan, dan pembelajaran orang dewasa di Indonesia. Oleh sebab itu, kebijakan perlu bergerak dari perluasan akses menuju kualitas, relevansi, dan pemerataan hasil.

Kapabilitas manusia berkembang sepanjang siklus hidup. Gizi ibu, kesehatan kehamilan, stimulasi anak usia dini, kualitas sekolah dasar, masa transisi remaja, pendidikan tinggi atau vokasi, pengalaman kerja pertama, pembelajaran orang dewasa, dan perlindungan kesehatan pada usia lanjut saling memengaruhi. Kekurangan pada tahap awal sering menghasilkan kerugian kumulatif yang sulit diperbaiki. Investasi sumber daya manusia harus konsisten lintas kementerian dan lintas periode politik karena hasilnya baru terlihat dalam jangka menengah dan panjang.

Kualitas manusia juga bersifat kontekstual. Keterampilan yang produktif di satu wilayah atau sektor belum tentu relevan di tempat lain. Daerah pertanian membutuhkan kombinasi agronomi, mekanisasi, bisnis, dan data; kawasan industri membutuhkan teknisi, insinyur, supervisor, dan ahli mutu; ekonomi kreatif membutuhkan desain, bahasa, pemasaran, serta hak kekayaan intelektual. Karena itu, sistem pendidikan dan pelatihan perlu membangun fondasi universal sekaligus memberi ruang adaptasi lokal.

Pada akhirnya, manusia berkualitas bukan hanya pekerja yang patuh, tetapi pembelajar yang mampu bertanya, menilai bukti, bekerja sama, dan mengambil keputusan bertanggung jawab. Di era kecerdasan buatan, nilai manusia justru semakin terletak pada penilaian, empati, etika, imajinasi, dan kemampuan memahami konteks. Pembangunan SDM harus mempersiapkan warga bukan hanya untuk pekerjaan yang ada, tetapi juga untuk menciptakan pekerjaan baru dan mengelola perubahan dengan bijaksana.

4. Bonus Demografi dan Risiko Kehilangan Momentum

Bonus demografi sering digambarkan sebagai peluang otomatis yang muncul ketika proporsi penduduk usia kerja lebih besar daripada penduduk tanggungan. Padahal struktur umur hanya menyediakan kemungkinan. Dividen ekonomi terjadi apabila penduduk usia kerja sehat, terdidik, memperoleh pekerjaan produktif, memiliki akses keuangan, dan hidup dalam institusi yang mendukung mobilitas. Tanpa kondisi tersebut, ledakan usia kerja dapat berubah menjadi pengangguran, informalisasi, ketimpangan, dan ketidakpuasan.

Indonesia menghadapi jendela waktu yang terbatas. Generasi muda memasuki pasar kerja ketika otomatisasi, platform digital, transisi hijau, dan perubahan rantai pasok mengubah jenis pekerjaan. Banyak pekerjaan rutin akan diperkecil atau didesain ulang, sementara pekerjaan baru membutuhkan kombinasi keterampilan teknis dan sosial. Karena itu, pendidikan yang terlalu lambat menyesuaikan diri akan menghasilkan ketidakcocokan antara lulusan dan kebutuhan ekonomi.

Kualitas transisi dari sekolah ke kerja menjadi penentu. Pengalaman kerja pertama yang buruk dapat menimbulkan efek luka jangka panjang pada upah dan karier. Sistem magang, bimbingan karier, sertifikasi berbasis kompetensi, informasi pasar kerja, dan layanan penempatan harus dipandang sebagai bagian dari kebijakan produktivitas. Dunia usaha perlu terlibat bukan hanya sebagai pengguna lulusan, tetapi sebagai mitra desain kurikulum dan tempat belajar.

Bonus demografi juga memerlukan peningkatan partisipasi perempuan. Hambatan pengasuhan, keamanan transportasi, diskriminasi, dan norma sosial menyebabkan banyak

perempuan berpendidikan tidak dapat memanfaatkan kemampuannya secara penuh. Penyediaan layanan pengasuhan yang terjangkau, perlindungan maternitas, fleksibilitas kerja yang sehat, dan penegakan kesempatan setara akan meningkatkan basis talenta sekaligus pendapatan rumah tangga.

Strategi bonus demografi harus disertai persiapan menuju masyarakat menua. Produktivitas perlu meningkat sebelum rasio ketergantungan kembali naik. Artinya, kebijakan saat ini harus menghasilkan tabungan, sistem pensiun, kesehatan preventif, dan teknologi yang memungkinkan pekerja lanjut usia tetap produktif. Bonus demografi adalah perlombaan melawan waktu; keberhasilannya ditentukan oleh keputusan pendidikan, kesehatan, dan pasar kerja yang diambil hari ini.

5. Mutu Pendidikan Dasar sebagai Fondasi Produktivitas Nasional

Pendidikan dasar adalah infrastruktur produktivitas yang paling mendasar. Kemampuan membaca dengan pemahaman, numerasi, penalaran ilmiah, komunikasi, dan kebiasaan belajar menentukan kemampuan seseorang mengikuti pelatihan berikutnya. Apabila fondasi ini lemah, pendidikan menengah, vokasi, dan perguruan tinggi harus menanggung biaya remedial, sedangkan perusahaan menghadapi tenaga kerja yang sulit dilatih.

Tantangan Indonesia bukan hanya akses, tetapi variasi mutu antarsekolah dan antarwilayah. Reformasi kurikulum perlu diikuti kapasitas guru, kepemimpinan sekolah, asesmen diagnostik, bahan ajar, dan dukungan bagi siswa yang tertinggal. OECD (2024b) menilai bahwa reformasi pendidikan Indonesia telah mengarah pada kompetensi dasar dan pembelajaran yang lebih fleksibel, tetapi keberhasilannya bergantung pada implementasi yang konsisten dan pembelajaran profesional guru.

Guru merupakan inti sistem. Kebijakan kesejahteraan dan sertifikasi harus dihubungkan dengan praktik mengajar, pembinaan, observasi kelas, dan komunitas belajar. Pengembangan guru tidak cukup berupa seminar singkat; ia memerlukan pendampingan, umpan balik, contoh praktik, dan waktu untuk merencanakan pembelajaran. Kepala sekolah perlu dipilih dan dikembangkan sebagai pemimpin pembelajaran, bukan sekadar administrator.

Teknologi pendidikan dapat memperluas akses dan membantu personalisasi, tetapi tidak menggantikan kualitas pedagogi. Perangkat tanpa konten, konektivitas, dan dukungan guru berisiko menjadi pengadaan yang kurang terpakai. Pendekatan yang lebih produktif adalah menggunakan teknologi untuk asesmen cepat, materi adaptif, kolaborasi guru, dan dukungan bagi daerah terpencil, sambil memastikan perlindungan data dan kesetaraan akses.

Ukuran keberhasilan pendidikan dasar harus bergeser dari kepatuhan administratif menuju hasil belajar dan perkembangan siswa. Data harus digunakan untuk perbaikan, bukan penghukuman. Sekolah dengan tantangan besar memerlukan dukungan lebih banyak. Dengan fondasi yang kuat, investasi pada vokasi, perguruan tinggi, dan digitalisasi akan menghasilkan pengembalian lebih tinggi karena peserta didik memiliki kemampuan belajar yang memadai.

6. Pendidikan Vokasi, Perguruan Tinggi, dan Kecocokan Keterampilan

Ekonomi produktif membutuhkan ekosistem keterampilan yang menghubungkan sekolah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, perusahaan, asosiasi profesi, dan pemerintah daerah. Kesenjangan keterampilan tidak selalu berarti kurangnya lulusan; sering kali masalahnya adalah kurikulum yang tertinggal, informasi pasar kerja yang lemah, atau minimnya pengalaman

praktis. Karena itu, kecocokan keterampilan harus dibangun melalui interaksi rutin antara penyedia pendidikan dan pengguna kompetensi.

Pendidikan vokasi harus menghindari dua ekstrem: terlalu sempit mengikuti teknologi saat ini sehingga cepat usang, atau terlalu umum sehingga tidak siap kerja. Kurikulum perlu menggabungkan keterampilan teknis, literasi digital, keselamatan, komunikasi, pemecahan masalah, dan kemampuan belajar. Model pembelajaran ganda, magang bermutu, serta instruktur dari industri dapat memperkuat relevansi, tetapi harus disertai standar agar peserta tidak sekadar menjadi tenaga murah.

Perguruan tinggi memiliki peran lebih luas daripada memasok tenaga kerja. Universitas membangun ilmu, penelitian, kepemimpinan, kewirausahaan, dan kapasitas reflektif masyarakat. Namun program studi perlu lebih transparan mengenai hasil lulusan, memperkuat pengalaman proyek, dan membuka jalur pembelajaran lintas disiplin. Kemitraan dengan industri sebaiknya tidak mengorbankan kebebasan akademik, melainkan memperkaya relevansi dan transfer pengetahuan.

Sistem kredensial perlu menjadi lebih fleksibel. Microcredentials, pengakuan pembelajaran lampau, dan sertifikasi kompetensi dapat memudahkan pekerja memperbarui kemampuan tanpa meninggalkan pekerjaan terlalu lama. Namun kualitas dan keterbandingan kredensial harus dijaga. Kerangka kualifikasi yang jelas, asesmen independen, dan informasi publik mengenai hasil pelatihan diperlukan untuk mencegah inflasi sertifikat.

Kebijakan keterampilan harus berbasis wilayah dan sektor. Peta kebutuhan tenaga kerja nasional perlu diterjemahkan ke dalam ekosistem lokal: maritim, pariwisata, manufaktur, pertanian, kesehatan, konstruksi, digital, atau ekonomi kreatif. Dengan demikian, pendidikan tidak berjalan terpisah dari strategi pembangunan daerah, dan investasi baru dapat memperoleh talenta yang dibutuhkan tanpa mengandalkan impor tenaga ahli secara permanen.

7. Kesehatan, Gizi, dan Produktivitas Sepanjang Hayat

Kesehatan sering diperlakukan sebagai sektor sosial yang terpisah dari ekonomi, padahal ia merupakan modal produktif. Pekerja yang sehat memiliki energi, konsentrasi, kehadiran, dan kemampuan belajar lebih baik. Penyakit kronis, gangguan kesehatan mental, kecelakaan kerja, dan kekurangan gizi menurunkan produktivitas, meningkatkan biaya perusahaan, dan mengurangi pendapatan rumah tangga. Investasi kesehatan dengan demikian adalah investasi ekonomi.

Gizi pada seribu hari pertama kehidupan memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan kognitif dan kesehatan. Pencegahan stunting harus menggabungkan layanan kesehatan ibu-anak, air bersih, sanitasi, pendidikan keluarga, perlindungan sosial, serta ketersediaan pangan bergizi. Program makanan tidak cukup dinilai dari jumlah porsi; kualitas nutrisi, keamanan pangan, ketepatan sasaran, dan efek pada kehadiran serta belajar harus diukur.

Pada usia kerja, beban penyakit tidak menular semakin penting. Hipertensi, diabetes, penyakit jantung, obesitas, dan kesehatan mental memerlukan pendekatan preventif. Tempat kerja dapat menjadi ruang promosi kesehatan melalui pemeriksaan, desain kerja ergonomis, budaya keselamatan, dukungan psikologis, dan pengaturan waktu yang manusiawi. Produktivitas tidak akan berkelanjutan apabila dicapai melalui kelelahan dan jam kerja berlebihan.

Sistem kesehatan juga memerlukan produktivitas internal. Digitalisasi rekam medis, pembelian obat yang efisien, penguatan layanan primer, dan rujukan yang tepat dapat meningkatkan hasil dengan biaya lebih terkendali. Distribusi tenaga kesehatan harus diperbaiki agar wilayah terpencil tidak terus mengalami kekurangan. Telemedicine dapat membantu, tetapi tetap membutuhkan infrastruktur, regulasi, dan tenaga lokal.

Hubungan kesehatan dan ekonomi bersifat dua arah. Pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan gizi dan perawatan lebih baik, sedangkan kesehatan meningkatkan kemampuan menghasilkan pendapatan. Kebijakan yang memutus lingkaran kemiskinan dan penyakit akan memberikan manfaat antargenerasi. Oleh karena itu, indikator produktivitas nasional perlu membaca hari kerja hilang, kualitas kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan mental, bukan hanya output per pekerja.

8. Pembelajaran Sepanjang Hayat dalam Era AI dan Otomatisasi

Perubahan teknologi memperpendek umur ekonomis keterampilan. Pengetahuan yang diperoleh pada usia dua puluh tahun tidak cukup untuk menopang karier empat dekade. Pembelajaran sepanjang hayat harus menjadi bagian normal dari sistem kerja, bukan kegiatan tambahan ketika seseorang menganggur. Perusahaan, pekerja, pemerintah, dan lembaga pendidikan perlu berbagi tanggung jawab membangun kesempatan belajar yang terjangkau dan relevan.

Kecerdasan buatan mengubah tugas, bukan hanya pekerjaan. Aktivitas rutin dalam administrasi, analisis, desain, pelayanan, dan produksi dapat diotomatisasi sebagian, sementara kebutuhan akan penilaian, komunikasi, kreativitas, dan pengawasan meningkat. Autor (2015) menjelaskan bahwa teknologi sering menggantikan sebagian tugas sekaligus melengkapi tugas lain. Kebijakan tidak boleh hanya memprediksi pekerjaan yang hilang, tetapi harus membantu pekerja berpindah ke kombinasi tugas yang lebih bernilai.

Perusahaan perlu membangun arsitektur pembelajaran: pemetaan keterampilan, jalur karier, proyek lintas fungsi, coaching, dan waktu belajar. Pelatihan akan lebih efektif apabila terkait masalah kerja nyata dan diikuti kesempatan menerapkan kemampuan baru. Organisasi yang menghukum kesalahan secara berlebihan akan menghambat eksperimen, sedangkan organisasi pembelajar menggunakan kegagalan kecil sebagai sumber perbaikan.

Negara dapat mendukung melalui akun pelatihan, insentif bagi perusahaan, informasi pasar kerja, standar mutu penyedia, dan perlindungan bagi pekerja yang menjalani transisi. Pembiayaan harus menghindari subsidi tanpa hasil. Program perlu dievaluasi berdasarkan pekerjaan, upah, produktivitas, dan keberlanjutan karier setelah pelatihan, bukan sekadar jumlah peserta.

Literasi AI harus mencakup kemampuan menggunakan, mengevaluasi, dan mengawasi sistem, termasuk memahami bias, privasi, keamanan, dan batasannya. Tujuan pendidikan bukan membuat semua orang menjadi pemrogram, tetapi memastikan pekerja mampu berkolaborasi dengan teknologi secara kritis. Kecerdasan manusia tetap diperlukan untuk menentukan tujuan, menilai konsekuensi, dan mengambil tanggung jawab.

9. Diagnosis Produktivitas Indonesia: Mengapa Pertumbuhan Belum Cukup

Diagnosis ekonomi Indonesia perlu membedakan pertumbuhan output dari perubahan produktivitas. Pertumbuhan dapat meningkat karena harga komoditas, belanja, atau penambahan tenaga kerja, sementara efisiensi dan kualitas pekerjaan tertinggal. Bagian ini menelaah kendala tersebut sebagai dasar strategi produktivitas dan SDM.

Pertumbuhan sekitar lima persen merupakan capaian penting, tetapi belum memadai untuk mempercepat konvergensi menuju negara berpendapatan tinggi. Indonesia masih menghadapi produktivitas yang melambat, dominasi pekerjaan informal, kualitas pembelajaran yang timpang, kedalaman keuangan terbatas, biaya logistik tinggi, dan kompleksitas regulasi. Ketika pertumbuhan tenaga kerja dan akumulasi modal tidak lagi secepat sebelumnya, sumber pertumbuhan harus bergeser menuju produktivitas dan inovasi. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks diagnosis: mengapa pertumbuhan lima persen belum cukup, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Bank Dunia pada 2025 dan 2026 menekankan bahwa reformasi yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas dapat membuka pertumbuhan yang lebih tinggi serta menciptakan pekerjaan yang lebih baik. IMF juga menilai bahwa pertumbuhan Indonesia tetap kuat, tetapi reformasi berani diperlukan untuk memperkuat iklim usaha, pertumbuhan yang dipimpin sektor swasta, produktivitas, dan penciptaan pekerjaan. Pesan yang konsisten adalah bahwa ketahanan makro perlu diterjemahkan menjadi kapasitas mikro yang lebih produktif. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks diagnosis: mengapa pertumbuhan lima persen belum cukup, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Pertumbuhan lima persen dapat terasa berbeda bagi kelompok sosial yang berbeda. Perusahaan besar yang terhubung dengan komoditas, keuangan, dan infrastruktur mungkin berkembang cepat, sedangkan pekerja muda, rumah tangga kelas menengah rentan, dan UMKM menghadapi upah stagnan, biaya hidup, keterbatasan pembiayaan, serta ketidakpastian kerja. Jika kualitas pekerjaan tertinggal, angka pertumbuhan tidak otomatis menjadi rasa aman ekonomi. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks diagnosis: mengapa pertumbuhan lima persen belum cukup, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh

berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Diagnosis yang tepat mencegah reformasi berubah menjadi daftar proyek. Masalah Indonesia bukan kekurangan inisiatif, melainkan fragmentasi kebijakan, lemahnya koordinasi, insentif yang bertentangan, dan kesenjangan implementasi. Reformasi harus menghubungkan tujuan nasional dengan mekanisme pelaksanaan, anggaran, indikator hasil, akuntabilitas, dan umpan balik. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks diagnosis: mengapa pertumbuhan lima persen belum cukup, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai diagnosis: mengapa pertumbuhan lima persen belum cukup memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

10. Produktivitas Perusahaan dan Kualitas Manajemen

Produktivitas nasional merupakan agregasi jutaan keputusan organisasi. Teknologi hanya memberi hasil apabila perusahaan memiliki manajemen, proses, data, dan tenaga kerja yang mampu menggunakannya.

Produktivitas menunjukkan seberapa efektif tenaga kerja, modal, energi, tanah, dan pengetahuan diubah menjadi nilai tambah. Dalam jangka panjang, kenaikan pendapatan per kapita tidak dapat terus bergantung pada penambahan jam kerja, eksploitasi sumber daya, atau ekspansi kredit. Produktivitas harus meningkat melalui teknologi, keterampilan, manajemen, skala usaha, persaingan, infrastruktur, dan institusi yang lebih baik. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks produktivitas sebagai inti agenda reformasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan,

keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Produktivitas agregat dapat naik melalui dua mekanisme. Pertama, produktivitas di dalam perusahaan atau sektor meningkat karena adopsi teknologi dan praktik manajemen. Kedua, tenaga kerja dan modal berpindah dari kegiatan berproduktivitas rendah menuju kegiatan yang lebih produktif. Indonesia membutuhkan keduanya. Digitalisasi pabrik tanpa mobilitas tenaga kerja tidak cukup, dan perpindahan tenaga kerja tanpa perusahaan produktif juga tidak menciptakan transformasi. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks produktivitas sebagai inti agenda reformasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Kebijakan produktivitas perlu membangun ekosistem difusi teknologi, bukan hanya mendukung segelintir juara nasional. Banyak perusahaan kecil tidak mengadopsi teknologi karena kekurangan keterampilan, pembiayaan, standar, informasi, dan pasar. Pusat ekstensi teknologi, layanan diagnostik produktivitas, insentif pelatihan, laboratorium bersama, dan kemitraan universitas-industri dapat memperluas manfaat inovasi. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks produktivitas sebagai inti agenda reformasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Pengukuran produktivitas juga harus diperbaiki. Pemerintah memerlukan data perusahaan yang terintegrasi, aman, dan dapat dianalisis untuk membedakan hambatan berdasarkan sektor, ukuran, lokasi, serta usia perusahaan. Tanpa diagnosis mikro, kebijakan industri mudah menjadi subsidi umum yang mahal dan sulit dievaluasi. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks produktivitas sebagai inti agenda reformasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa

perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai produktivitas sebagai inti agenda reformasi memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

11. Transformasi Struktural dan Industrialisasi Bernilai Tambah

Peningkatan kualitas manusia membutuhkan struktur ekonomi yang menyediakan pekerjaan bermutu. Industrialisasi generasi baru harus mempertemukan teknologi, keterampilan, rantai pasok domestik, dan pembelajaran perusahaan.

Transformasi struktural secara klasik berarti perpindahan tenaga kerja dari pertanian tradisional menuju manufaktur dan jasa modern. Namun industrialisasi abad ke-21 berbeda dari masa lalu. Otomasi, ekonomi digital, jasa yang dapat diperdagangkan, standar lingkungan, dan fragmentasi rantai pasok mengubah jalan menuju produktivitas tinggi. Indonesia tetap membutuhkan manufaktur, tetapi manufaktur harus terhubung dengan desain, data, logistik, layanan purna jual, energi bersih, dan riset. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks transformasi struktural dan industrialisasi generasi baru, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Hilirisasi sumber daya alam dapat menjadi pintu masuk, tetapi tidak boleh berhenti pada pemrosesan tahap awal. Nilai tambah tertinggi sering berada pada rekayasa, bahan maju, komponen, perangkat lunak, merek, pembiayaan, dan layanan. Strategi industri harus mendorong pendalaman rantai nilai, keterkaitan pemasok domestik, peningkatan standar, transfer keterampilan, dan diversifikasi produk. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks transformasi struktural dan industrialisasi generasi baru, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman

reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Risiko industrialisasi berbasis komoditas adalah ketergantungan pada harga dunia, konsentrasi pasar, tekanan lingkungan, dan enclaves yang lemah kaitannya dengan ekonomi lokal. Karena itu insentif industri harus bersyarat pada kinerja: investasi riset, penggunaan pemasok yang kompetitif, pengembangan tenaga kerja, efisiensi energi, ekspor, serta kepatuhan lingkungan. Perlindungan tanpa disiplin dapat mempertahankan perusahaan tidak efisien. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks transformasi struktural dan industrialisasi generasi baru, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Industrialisasi generasi baru juga mencakup agroindustri, bioekonomi, industri kesehatan, maritim, peralatan energi terbarukan, elektronik, pusat data, industri kreatif, dan jasa profesional. Portofolio yang beragam mengurangi risiko dan membuka jalur produktivitas bagi berbagai wilayah Indonesia. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks transformasi struktural dan industrialisasi generasi baru, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai transformasi struktural dan industrialisasi generasi baru memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

12. Pasar Kerja Produktif: Fleksibilitas, Perlindungan, dan Mobilitas

Pasar kerja yang produktif memungkinkan pekerja dan perusahaan menyesuaikan diri tanpa membebankan seluruh risiko pada pihak yang paling lemah. Fleksibilitas perlu dipadukan dengan perlindungan, layanan transisi, dan peningkatan keterampilan.

Pasar tenaga kerja Indonesia ditandai oleh informalitas tinggi, perlindungan yang terfragmentasi, kesenjangan keterampilan, dan produktivitas yang berbeda tajam. Reformasi perlu menghindari dikotomi antara fleksibilitas dan perlindungan. Perusahaan membutuhkan kemampuan menyesuaikan organisasi, sementara pekerja membutuhkan pendapatan, jaminan sosial, keterampilan, dan peluang transisi. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks reformasi pasar tenaga kerja: fleksibilitas dengan keamanan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Konsep flexicurity menawarkan arah: aturan kerja yang adaptif disertai asuransi kehilangan pekerjaan, layanan penempatan, pelatihan, portabilitas manfaat, dan dialog sosial. Perlindungan sebaiknya semakin melekat pada pekerja, bukan hanya pada status hubungan kerja tertentu. Hal ini penting bagi pekerja platform, kontrak, paruh waktu, dan wiraswasta. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks reformasi pasar tenaga kerja: fleksibilitas dengan keamanan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Kebijakan upah minimum perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup, produktivitas, kondisi daerah, dan daya serap kerja. Namun upah tidak boleh menjadi satu-satunya instrumen kesejahteraan. Perumahan terjangkau, transportasi publik, kesehatan, penitipan anak, dan perlindungan sosial dapat meningkatkan pendapatan riil tanpa menekan seluruh biaya melalui pengusaha. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks reformasi pasar tenaga kerja: fleksibilitas dengan keamanan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus

menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Reformasi juga harus meningkatkan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok muda. Investasi pada layanan pengasuhan, keamanan transportasi, kerja fleksibel, anti-diskriminasi, dan pengakuan keterampilan dapat memperluas basis tenaga kerja produktif. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks reformasi pasar tenaga kerja: fleksibilitas dengan keamanan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai reformasi pasar tenaga kerja: fleksibilitas dengan keamanan memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

13. Pendidikan dan Reformasi Modal Manusia

Pendidikan merupakan saluran utama pembentukan modal manusia, tetapi dampak ekonominya bergantung pada mutu, pemerataan, relevansi, dan kemampuan lulusan terus belajar.

Bonus demografi hanya menjadi dividen apabila penduduk memiliki kesehatan, keterampilan, dan kesempatan kerja produktif. Reformasi pendidikan harus bergeser dari orientasi input dan sertifikat menuju hasil pembelajaran, kemampuan bernalar, literasi digital, karakter, komunikasi, dan pembelajaran sepanjang hayat. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks pendidikan, keterampilan, dan reformasi modal manusia, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Masalah keterampilan bukan hanya jumlah lulusan, tetapi ketidakcocokan antara kurikulum, teknologi, dan kebutuhan kerja. Pendidikan vokasi perlu dibangun melalui kemitraan nyata dengan industri, standar kompetensi yang dapat diperbarui, instruktur berpengalaman, magang bermutu, dan sertifikasi yang diakui lintas perusahaan. Kemitraan tidak boleh menjadi seremoni; perusahaan harus ikut merancang, menyediakan peralatan, dan mengevaluasi. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks pendidikan, keterampilan, dan reformasi modal manusia, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Perguruan tinggi memerlukan reformasi insentif agar penelitian, pengajaran, dan pengabdian terhubung dengan masalah pembangunan tanpa kehilangan kebebasan akademik. Pendanaan kompetitif, laboratorium bersama, mobilitas peneliti, kantor transfer teknologi, dan kolaborasi internasional dapat meningkatkan kapasitas inovasi. Namun kualitas dasar pengajaran tetap harus menjadi prioritas. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks pendidikan, keterampilan, dan reformasi modal manusia, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Pembelajaran sepanjang hayat membutuhkan akun pelatihan individu, micro-credentials yang bermutu, pengakuan pembelajaran lampau, dan informasi pasar kerja. Negara perlu memastikan pelatihan tidak menjadi industri sertifikat tanpa dampak. Evaluasi harus mengukur penempatan kerja, kenaikan pendapatan, dan produktivitas. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks pendidikan, keterampilan, dan reformasi modal manusia, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai pendidikan, keterampilan, dan reformasi modal manusia memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan

berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

14. Kesehatan sebagai Infrastruktur Produktivitas

Kesehatan bukan sekadar sektor sosial, melainkan infrastruktur produktivitas. Stunting, penyakit tidak menular, kesehatan mental, polusi, dan akses layanan yang timpang mengurangi kemampuan belajar dan bekerja. Reformasi kesehatan harus menguatkan pencegahan, pelayanan primer, pembiayaan berkelanjutan, kualitas klinis, dan pemerataan tenaga kesehatan. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks kesehatan sebagai infrastruktur produktivitas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Jaminan kesehatan universal perlu dijaga melalui tata kelola klaim, pembayaran berbasis hasil, rujukan efektif, digitalisasi rekam medis, dan pengadaan transparan. Efisiensi bukan berarti mengurangi layanan penting, tetapi mengalihkan sumber daya dari tindakan bernilai rendah menuju intervensi yang paling berdampak. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks kesehatan sebagai infrastruktur produktivitas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Industri kesehatan juga memiliki potensi struktural: farmasi, alat kesehatan, bioteknologi, data kesehatan, dan layanan medis. Kebijakan substitusi impor perlu dipadukan dengan standar kualitas, riset, pengujian, dan akses pasar global. Produksi domestik yang tidak kompetitif dapat meningkatkan biaya sistem kesehatan. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks kesehatan sebagai infrastruktur produktivitas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak

sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Kesehatan kerja harus menjadi bagian dari strategi produktivitas perusahaan. Pencegahan kecelakaan, ergonomi, manajemen kelelahan, kesehatan mental, dan lingkungan kerja sehat menurunkan biaya tersembunyi berupa absensi, turnover, serta penurunan kualitas. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks kesehatan sebagai infrastruktur produktivitas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai kesehatan sebagai infrastruktur produktivitas memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

15. Infrastruktur, Logistik, dan Konektivitas Produktif

Infrastruktur meningkatkan produktivitas ketika menurunkan waktu, biaya, ketidakpastian, dan kesenjangan akses. Nilainya harus diukur melalui pemanfaatan ekonomi dan manfaat manusia, bukan hanya nilai proyek.

Sebagai negara kepulauan, biaya konektivitas merupakan faktor struktural. Infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, kereta, listrik, air, dan telekomunikasi harus dipandang sebagai jaringan, bukan proyek terpisah. Nilai infrastruktur muncul ketika simpul terhubung dengan kawasan produksi, pasar, dan layanan. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks infrastruktur, logistik, dan konektivitas kepulauan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Reformasi logistik mencakup standardisasi dokumen, interoperabilitas sistem pelabuhan, jadwal yang dapat diprediksi, kompetisi layanan, gudang, cold chain, dan konsolidasi kargo. Infrastruktur fisik tanpa reformasi proses dapat menghasilkan aset mahal dengan waktu tunggu tinggi. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks infrastruktur, logistik, dan konektivitas kepulauan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Pemilihan proyek harus didasarkan pada manfaat sosial-ekonomi, biaya siklus hidup, ketahanan iklim, dan dampak wilayah. Proyek prestisius dapat menyerap anggaran tetapi tidak selalu memiliki pengganda terbesar. Pemeliharaan perlu memperoleh bobot yang setara dengan pembangunan baru. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks infrastruktur, logistik, dan konektivitas kepulauan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Kemitraan pemerintah-swasta dapat membantu pembiayaan, tetapi risiko harus dialokasikan kepada pihak yang mampu mengelolanya. Transparansi kontrak, kewajiban kontinjensi, dan evaluasi value for money penting agar proyek tidak menjadi utang tersembunyi. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks infrastruktur, logistik, dan konektivitas kepulauan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai infrastruktur, logistik, dan konektivitas kepulauan memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan

diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

16. Digitalisasi, Data, dan Difusi Teknologi

Digitalisasi yang produktif bukan sekadar penggunaan aplikasi. Ia memerlukan perubahan proses, peningkatan keterampilan, kualitas data, keamanan, dan model organisasi.

Digitalisasi dapat mengurangi biaya transaksi, memperluas pasar, meningkatkan transparansi, dan menciptakan model bisnis baru. Namun transformasi digital bukan sekadar menyediakan aplikasi. Ia membutuhkan identitas digital, pembayaran, interoperabilitas, konektivitas, keamanan siber, perlindungan data, dan kompetisi platform. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks transformasi digital sebagai reformasi ekonomi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Fondasi digital publik dapat memungkinkan layanan pemerintah dan swasta dibangun lebih cepat. Prinsipnya adalah modular, terbuka, aman, dan berorientasi pada warga. Interoperabilitas mengurangi pengulangan data, tetapi harus disertai batas penggunaan, persetujuan, audit, dan mekanisme pemulihan ketika data salah. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks transformasi digital sebagai reformasi ekonomi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Kesenjangan digital memiliki dimensi akses, perangkat, keterampilan, bahasa, gender, dan kepercayaan. Pembangunan jaringan harus diikuti literasi dan dukungan penggunaan produktif. Jika tidak, digitalisasi dapat memperbesar keunggulan perusahaan dan wilayah yang telah maju. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks transformasi digital sebagai reformasi ekonomi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan

siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Kecerdasan buatan menambah urgensi reformasi. Perusahaan membutuhkan data berkualitas, talenta, tata kelola model, dan keamanan. Negara memerlukan kerangka berbasis risiko yang melindungi masyarakat tanpa membekukan inovasi. Pengadaan AI oleh pemerintah harus transparan dan dapat diaudit. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks transformasi digital sebagai reformasi ekonomi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai transformasi digital sebagai reformasi ekonomi memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

17. UMKM, Formalisasi, dan Kenaikan Kelas Produktivitas

UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi banyak berada pada skala mikro dengan produktivitas, modal, dan akses pasar terbatas. Reformasi tidak boleh memandang UMKM sebagai kategori permanen yang harus selalu dilindungi, melainkan sebagai spektrum perusahaan yang perlu diberi jalur untuk tumbuh. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks umkm, formalisasi, dan kenaikan kelas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Formalisasi akan terjadi apabila manfaatnya melebihi biaya. Registrasi sederhana harus disertai akses pembiayaan, pengadaan, perlindungan sosial, pelatihan, dan penyelesaian sengketa. Jika formalitas hanya menambah pajak dan kewajiban, usaha akan tetap informal. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam

konteks umkm, formalisasi, dan kenaikan kelas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Pembiayaan UMKM perlu bergerak dari agunan menuju arus kas, data transaksi, invoice financing, dan penjaminan yang disiplin. Kredit bersubsidi dapat membantu, tetapi perlu mencegah ketergantungan dan salah sasaran. Pendampingan manajemen sering sama pentingnya dengan modal. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks umkm, formalisasi, dan kenaikan kelas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Kenaikan kelas juga memerlukan agregasi dan jaringan. Koperasi modern, klaster, platform ekspor, standar bersama, dan kemitraan pemasok dapat memberikan skala tanpa menghilangkan kepemilikan. Kebijakan harus mengukur apakah UMKM meningkatkan produktivitas, bukan hanya jumlah penerima bantuan. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks umkm, formalisasi, dan kenaikan kelas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai umkm, formalisasi, dan kenaikan kelas memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

18. Investasi, Perdagangan, dan Pembelajaran Rantai Nilai

Investasi dan perdagangan menjadi mesin produktivitas apabila mendorong transfer pengetahuan, peningkatan pemasok lokal, standar mutu, ekspor, dan mobilitas keterampilan.

Keterbukaan perdagangan memungkinkan perusahaan mengakses input, teknologi, pasar, dan kompetisi. Proteksi selektif kadang dibutuhkan untuk tujuan strategis, tetapi pembatasan input dapat menaikkan biaya bagi industri hilir. Kebijakan perdagangan harus menilai dampak sepanjang rantai nilai, bukan hanya satu sektor. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks perdagangan, investasi, dan integrasi rantai nilai, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Perjanjian perdagangan memberi manfaat ketika perusahaan domestik mampu memenuhi standar, logistik, dan skala. Karena itu diplomasi perdagangan harus terhubung dengan layanan ekspor, sertifikasi, pembiayaan, dan intelijen pasar. UMKM tidak otomatis mengeksport hanya karena tarif turun. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks perdagangan, investasi, dan integrasi rantai nilai, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Investasi asing langsung dapat membawa modal, teknologi, jaringan, dan keterampilan. Namun spillover tidak terjadi otomatis. Program pengembangan pemasok, mobilitas tenaga ahli, riset bersama, dan standar lokal yang realistis diperlukan. Persyaratan kandungan lokal yang kaku dapat mengurangi daya saing jika pemasok belum siap. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks perdagangan, investasi, dan integrasi rantai nilai, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Indonesia perlu mengelola ketegangan antara kedaulatan ekonomi dan integrasi global secara pragmatis. Kedaulatan yang kuat berasal dari kapasitas teknologi, fiskal, dan perusahaan domestik, bukan isolasi. Diversifikasi mitra mengurangi risiko geopolitik. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks perdagangan, investasi, dan integrasi rantai nilai, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai perdagangan, investasi, dan integrasi rantai nilai memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

19. Produktivitas Pertanian dan Transformasi Perdesaan

Produktivitas pertanian menentukan pendapatan jutaan rumah tangga, ketahanan pangan, dan kecepatan transformasi struktural. Modernisasi harus memperkuat petani, bukan sekadar memperbesar skala produksi.

Produktivitas pertanian dipengaruhi oleh skala lahan, kepastian hak, irigasi, benih, penyuluhan, pembiayaan, logistik, dan akses pasar. Reformasi agraria harus menggabungkan legalisasi aset dengan konsolidasi produktif, perlindungan petani, dan tata ruang yang berkelanjutan. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks reformasi agraria, pertanian, dan sistem pangan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Kebijakan pangan sering terjebak antara stabilisasi harga konsumen dan pendapatan produsen. Instrumen perlu dibedakan: cadangan untuk guncangan, bantuan untuk rumah tangga, asuransi untuk petani, dan investasi untuk produktivitas. Larangan impor mendadak dapat menimbulkan volatilitas dan memberi rente. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi

yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks reformasi agraria, pertanian, dan sistem pangan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Digitalisasi pertanian dapat mendukung informasi cuaca, harga, traceability, dan pembiayaan, tetapi tidak menggantikan penyuluh, infrastruktur, serta organisasi petani. Teknologi harus dirancang sesuai skala dan kemampuan pengguna. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks reformasi agraria, pertanian, dan sistem pangan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Transformasi pangan mencakup agroindustri, cold chain, keamanan pangan, dan pengurangan kehilangan. Nilai tambah dapat tumbuh di daerah jika kebijakan menghubungkan produksi primer dengan pengolahan dan pasar. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks reformasi agraria, pertanian, dan sistem pangan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai reformasi agraria, pertanian, dan sistem pangan memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

20. Ekonomi Hijau, Energi, dan Keterampilan Masa Depan

Transisi hijau menciptakan kebutuhan keterampilan baru sekaligus risiko bagi pekerja dan wilayah yang bergantung pada ekonomi karbon. Kebijakan harus menggabungkan teknologi, pembiayaan, dan keadilan transisi.

Perubahan iklim dan transisi energi mengubah daya saing. Industri yang bergantung pada energi karbon tinggi menghadapi risiko biaya, standar perbatasan, dan aset terlantar. Reformasi energi perlu mempercepat energi terbarukan, jaringan, penyimpanan, efisiensi, dan elektrifikasi dengan menjaga keterjangkauan serta keandalan. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks transisi energi dan reformasi ekonomi hijau, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Harga energi seharusnya secara bertahap mencerminkan biaya ekonomi dan lingkungan, tetapi reformasi subsidi harus melindungi rumah tangga rentan dan usaha kecil. Kompensasi langsung lebih transparan daripada harga murah universal, meskipun memerlukan data yang akurat. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks transisi energi dan reformasi ekonomi hijau, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Transisi adil berarti pekerja dan wilayah yang bergantung pada batu bara atau industri intensif karbon memperoleh jalur baru. Pelatihan, diversifikasi ekonomi lokal, rehabilitasi, dan dialog harus dimulai sebelum penutupan aset. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks transisi energi dan reformasi ekonomi hijau, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Ekonomi hijau juga membuka industri baru: kendaraan listrik, baterai, panas bumi, bioekonomi, material rendah karbon, jasa audit, dan pembiayaan hijau. Kebijakan industri harus memastikan manfaat teknologi, lingkungan, dan sosial, bukan sekadar volume investasi. Dari

sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks transisi energi dan reformasi ekonomi hijau, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai transisi energi dan reformasi ekonomi hijau memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

21. Tata Kelola, Meritokrasi, dan Kapasitas Negara

Negara yang produktif mampu mengubah anggaran, aturan, dan data menjadi layanan serta hasil. Meritokrasi dan kemampuan birokrasi merupakan bagian dari kualitas SDM nasional.

Reformasi ekonomi gagal bila institusi pelaksana lemah. Kapasitas negara mencakup kemampuan merumuskan kebijakan, mengumpulkan penerimaan, mengelola proyek, mengatur pasar, menyediakan layanan, dan belajar dari hasil. Struktur organisasi yang besar tidak sama dengan kapasitas. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks tata kelola, meritokrasi, dan kapasitas birokrasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Meritokrasi memerlukan rekrutmen terbuka, promosi berbasis kompetensi, evaluasi kinerja, mobilitas, dan perlindungan profesional dari intervensi. Talenta digital, ekonomi, teknik, kesehatan, dan lingkungan harus dapat masuk dan berkembang dalam layanan publik. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks tata kelola, meritokrasi, dan kapasitas birokrasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan.

Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Koordinasi lintas kementerian sering menjadi titik lemah. Unit koordinasi harus memiliki mandat, data, dan kemampuan menyelesaikan konflik, bukan hanya mengadakan rapat. Prioritas nasional perlu diterjemahkan menjadi hasil bersama dan anggaran yang terhubung. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks tata kelola, meritokrasi, dan kapasitas birokrasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Antikorupsi adalah kebijakan produktivitas. Korupsi menaikkan biaya, menurunkan kualitas proyek, dan menguntungkan perusahaan yang memiliki koneksi. Pencegahan melalui desain proses, transparansi, pengadaan elektronik, audit data, dan perlindungan pelapor harus berjalan bersama penegakan hukum. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks tata kelola, meritokrasi, dan kapasitas birokrasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai tata kelola, meritokrasi, dan kapasitas birokrasi memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

22. Regulasi, Kepastian Usaha, dan Biaya Produktivitas

Regulasi memengaruhi produktivitas melalui biaya kepatuhan, kepastian investasi, kecepatan inovasi, dan kesempatan perusahaan produktif untuk berkembang. Reformasi yang baik menyederhanakan proses tanpa mengurangi perlindungan publik.

Regulasi diperlukan untuk melindungi masyarakat, lingkungan, persaingan, dan stabilitas. Masalah muncul ketika peraturan tumpang tindih, berubah tanpa transisi, memiliki interpretasi berbeda, atau menciptakan biaya kepatuhan yang tidak proporsional. Kepastian berusaha bukan ketiadaan aturan, melainkan aturan yang jelas, konsisten, dapat diprediksi, dan ditegakkan secara adil. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks reformasi regulasi dan kepastian berusaha, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Reformasi regulasi harus bergerak dari pendekatan pemangkasan administratif menuju manajemen kualitas regulasi. Setiap regulasi penting perlu memiliki analisis dampak, konsultasi publik, penilaian biaya-manfaat, mekanisme keberatan, periode transisi, dan evaluasi pascapenerapan. Regulasi yang baik juga harus mudah ditemukan dalam portal tunggal dengan versi yang sah dan riwayat perubahan. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks reformasi regulasi dan kepastian berusaha, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Digitalisasi perizinan dapat mengurangi waktu dan kontak langsung, tetapi digitalisasi proses yang buruk hanya memindahkan birokrasi ke layar. Reformasi memerlukan penyederhanaan alur, interoperabilitas data, prinsip sekali menyerahkan data, standar layanan, serta tanggung jawab jelas ketika sistem gagal. Pelaku UMKM membutuhkan antarmuka sederhana dan bantuan, bukan hanya kewajiban digital. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks reformasi regulasi dan kepastian berusaha, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Kepastian hukum juga mencakup penyelesaian sengketa, hak kepemilikan, kontrak, kepailitan, dan konsistensi kebijakan pusat-daerah. Investor produktif menilai tidak hanya tarif pajak, tetapi kemampuan sistem melindungi investasi jangka panjang dan menyelesaikan masalah tanpa biaya informal. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap

dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks reformasi regulasi dan kepastian berusaha, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai reformasi regulasi dan kepastian berusaha memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

23. Persaingan Usaha, Inovasi, dan Disiplin Pasar

Persaingan yang sehat memberi insentif bagi perusahaan untuk memperbaiki mutu, mengembangkan pekerja, menurunkan biaya, dan berinovasi. Tanpa disiplin pasar, sumber daya dapat bertahan di kegiatan yang kurang produktif.

Persaingan mendorong perusahaan menurunkan biaya, meningkatkan mutu, mengadopsi teknologi, dan mencari pasar baru. Ketika pasar terlalu terkonsentrasi atau akses ditentukan oleh kedekatan politik, sumber daya mengalir kepada pelaku yang memiliki kekuatan, bukan produktivitas. Reformasi struktural harus memperkuat kebijakan persaingan sekaligus mencegah dominasi platform dan integrasi vertikal yang merugikan pemasok kecil. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks persaingan usaha dan disiplin pasar, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Kebijakan persaingan tidak hanya soal penindakan kartel. Ia mencakup desain pengadaan publik, netralitas antara BUMN dan swasta, akses infrastruktur esensial, transparansi subsidi, portabilitas data, standardisasi, dan kemudahan masuk-keluar pasar. Hambatan keluar sama pentingnya dengan hambatan masuk karena proses kepailitan yang lambat menahan aset pada perusahaan tidak produktif. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada

kelompok terdampak. Dalam konteks persaingan usaha dan disiplin pasar, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

BUMN memiliki peran strategis dalam infrastruktur, layanan dasar, dan stabilisasi, tetapi mandat komersial dan publik perlu dipisahkan secara transparan. Kompensasi atas penugasan publik harus jelas, tata kelola profesional diperkuat, dan perusahaan yang beroperasi di pasar kompetitif tunduk pada disiplin yang setara. Tujuannya bukan privatisasi otomatis, melainkan akuntabilitas atas modal negara. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks persaingan usaha dan disiplin pasar, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Persaingan juga harus disertai perlindungan konsumen. Pasar yang dinamis memerlukan informasi, keamanan produk, privasi data, dan mekanisme pemulihan kerugian. Kepercayaan konsumen adalah aset struktural yang mendukung ekonomi digital dan inovasi. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks persaingan usaha dan disiplin pasar, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai persaingan usaha dan disiplin pasar memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

24. Kebijakan Fiskal untuk Modal Manusia dan Produktivitas

Kapasitas fiskal menentukan kemampuan negara membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, riset, perlindungan sosial, dan transisi kerja. Kualitas belanja sama pentingnya dengan besaran anggaran.

Negara yang ingin melakukan transformasi memerlukan kapasitas fiskal. Penerimaan pajak Indonesia relatif terbatas dibandingkan kebutuhan pembangunan, sehingga reformasi harus memperluas basis, memperbaiki administrasi, mengurangi penghindaran, dan meninjau belanja pajak. Kenaikan penerimaan harus dilakukan adil dan tidak mematikan formalisasi usaha kecil. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks reformasi fiskal dan kapasitas negara, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Digitalisasi administrasi pajak memungkinkan pencocokan data dan pelayanan lebih baik, tetapi memerlukan tata kelola data, keamanan, mekanisme koreksi, dan perlindungan hak wajib pajak. Kepercayaan meningkat ketika aturan sederhana, sengketa diselesaikan cepat, dan penggunaan penerimaan terlihat dalam layanan publik. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks reformasi fiskal dan kapasitas negara, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Di sisi belanja, reformasi harus menggeser orientasi dari penyerapan menuju hasil. Program perlu memiliki teori perubahan, indikator, baseline, evaluasi, dan keputusan penghentian jika tidak efektif. Anggaran lintas kementerian harus mengatasi masalah yang bersifat lintas sektor, bukan mengikuti batas organisasi. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks reformasi fiskal dan kapasitas negara, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Subsidi perlu diarahkan secara lebih tepat. Subsidi harga yang luas sering dinikmati kelompok berpendapatan lebih tinggi dan mengurangi ruang untuk pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. Peralihan menuju dukungan terarah harus dilakukan bertahap, transparan, dan disertai kompensasi agar tidak menimbulkan guncangan sosial. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks reformasi fiskal dan kapasitas negara, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai reformasi fiskal dan kapasitas negara memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

25. Desentralisasi dan Ekosistem Produktivitas Daerah

Produktivitas nasional dibentuk di daerah. Pemerintah daerah memengaruhi mutu sekolah, kesehatan, perizinan, infrastruktur lokal, dan hubungan dengan dunia usaha; karena itu kapasitas dan akuntabilitas daerah menjadi faktor penentu.

Desentralisasi membawa keputusan lebih dekat kepada masyarakat, tetapi hasilnya beragam karena kapasitas, pendapatan, dan tata kelola daerah berbeda. Reformasi struktural harus memperkuat hubungan pusat-daerah, standar pelayanan, insentif transfer, dan akuntabilitas lokal. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks desentralisasi fiskal dan reformasi pemerintahan daerah, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Transfer fiskal sebaiknya memberi insentif terhadap hasil, bukan sekadar formula input. Daerah yang meningkatkan kualitas layanan, basis pajak, kemudahan berusaha, dan pengelolaan lingkungan dapat memperoleh penghargaan, sementara daerah tertinggal tetap menerima dukungan pemerataan. Desain harus mencegah daerah kaya sumber daya bergantung pada

rente. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks desentralisasi fiskal dan reformasi pemerintahan daerah, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Banyak hambatan investasi muncul pada tata ruang, izin lokal, pengadaan lahan, dan koordinasi utilitas. Sistem tata ruang digital, data bidang tanah, konsultasi publik, dan penyelesaian konflik harus diperkuat. Kepastian tidak boleh mengorbankan hak masyarakat adat atau lingkungan. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks desentralisasi fiskal dan reformasi pemerintahan daerah, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Kapasitas birokrasi daerah membutuhkan meritokrasi, pelatihan, mobilitas talenta, dan layanan bersama. Tidak semua daerah perlu membangun sistem sendiri; platform nasional dapat menyediakan fungsi digital, pengadaan, data, dan keamanan dengan ruang adaptasi lokal. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks desentralisasi fiskal dan reformasi pemerintahan daerah, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai desentralisasi fiskal dan reformasi pemerintahan daerah memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

26. Sektor Keuangan dan Pembiayaan Peningkatan Kapabilitas

Pembiayaan yang produktif mengalir ke perusahaan inovatif, UMKM yang layak tumbuh, pendidikan, perumahan, dan investasi hijau. Sistem keuangan juga harus membantu rumah tangga mengelola risiko dan membiayai pembelajaran.

Sektor keuangan menghubungkan tabungan dengan investasi. Kedalaman keuangan yang terbatas membuat perusahaan bergantung pada dana internal atau kredit bank jangka pendek. Reformasi perlu mengembangkan pasar obligasi, modal ventura, pembiayaan proyek, asuransi, dana pensiun, dan instrumen hijau. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks reformasi sektor keuangan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Inklusi keuangan harus dinilai dari penggunaan yang aman dan produktif, bukan hanya kepemilikan rekening. Kredit digital dapat memperluas akses tetapi juga menimbulkan risiko bunga tinggi, penipuan, dan penggunaan data. Perlindungan konsumen, literasi, dan pengawasan berbasis aktivitas sangat penting. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks reformasi sektor keuangan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Pembiayaan inovasi memerlukan toleransi terhadap kegagalan dan horizon panjang. Skema dana pendamping, jaminan portofolio, sandbox, dan insentif investor institusional dapat membantu, asalkan keputusan investasi tetap profesional dan tidak dipolitisasi. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks reformasi sektor keuangan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Stabilitas keuangan tetap menjadi prasyarat. Reformasi struktural tidak boleh mendorong pertumbuhan kredit tanpa kualitas. Pengawasan makroprudensial, resolusi bank, keamanan siber, dan koordinasi lembaga harus mengikuti kompleksitas sistem. Dari sudut pemerataan,

kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks reformasi sektor keuangan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai reformasi sektor keuangan memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

27. Perkotaan, Perumahan, dan Mobilitas Tenaga Kerja

Kota mempertemukan pekerja, perusahaan, pengetahuan, dan layanan. Namun kemacetan, perumahan mahal, serta transportasi buruk mengurangi waktu produktif dan membatasi mobilitas talenta.

Kota adalah mesin produktivitas karena mempertemukan perusahaan, pekerja, pengetahuan, dan layanan. Namun kemacetan, perumahan mahal, banjir, polusi, dan tata ruang terfragmentasi mengurangi manfaat aglomerasi. Reformasi perkotaan adalah agenda ekonomi nasional. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks reformasi perkotaan, perumahan, dan mobilitas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Perumahan terjangkau sebaiknya dipandang sebagai infrastruktur tenaga kerja. Ketika pekerja tinggal jauh dari pusat pekerjaan, biaya waktu dan transportasi menurunkan produktivitas dan kesejahteraan. Kebijakan perlu menghubungkan pembiayaan perumahan, penyediaan tanah, transportasi massal, dan kepadatan yang tepat. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks reformasi perkotaan, perumahan, dan mobilitas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi.

Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Pemerintah metropolitan memerlukan koordinasi lintas batas administratif. Transportasi, air, limbah, dan kualitas udara tidak berhenti pada batas kota. Otoritas bersama, pembagian pendapatan, dan data regional diperlukan. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks reformasi perkotaan, perumahan, dan mobilitas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Peningkatan nilai tanah akibat infrastruktur dapat membantu pembiayaan melalui land value capture yang transparan. Namun perlindungan terhadap penggusuran dan spekulasi harus kuat agar pembangunan tidak mengusir kelompok berpendapatan rendah. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks reformasi perkotaan, perumahan, dan mobilitas, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai reformasi perkotaan, perumahan, dan mobilitas memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

28. Politik Ekonomi Produktivitas dan Keadilan Transisi

Reformasi produktivitas menciptakan manfaat agregat, tetapi biaya dan keuntungannya tidak selalu terbagi merata. Strategi implementasi harus mengenali kelompok terdampak, menyediakan kompensasi, dan membangun koalisi perubahan.

Reformasi struktural menciptakan pemenang dan pihak yang menanggung biaya. Deregulasi dapat menguntungkan pendatang baru tetapi mengurangi rente pelaku lama. Reformasi subsidi membantu fiskal tetapi menaikkan harga. Penutupan industri tidak produktif membebaskan sumber daya tetapi mengguncang pekerja dan daerah. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks politik ekonomi reformasi: pemenang, pihak yang dirugikan, dan kompensasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Karena itu, desain teknis harus disertai strategi koalisi dan kompensasi. Pemerintah perlu menjelaskan masalah, manfaat, jadwal, serta perlindungan. Transparansi mengurangi ruang disinformasi. Kompensasi harus tepat sasaran dan bersifat transisi, bukan menciptakan distorsi baru permanen. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks politik ekonomi reformasi: pemenang, pihak yang dirugikan, dan kompensasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Urutan reformasi menentukan hasil. Pemerintah sebaiknya membangun kapasitas perlindungan sosial dan layanan transisi sebelum menghapus perlindungan lama. Reformasi yang menghasilkan manfaat cepat dapat membangun kepercayaan untuk perubahan yang lebih sulit. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks politik ekonomi reformasi: pemenang, pihak yang dirugikan, dan kompensasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Dialog sosial bukan hambatan, melainkan mekanisme memperoleh informasi dan legitimasi. Serikat pekerja, asosiasi usaha, daerah, akademisi, dan masyarakat perlu dilibatkan dengan aturan yang mencegah veto oleh kepentingan sempit. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks politik ekonomi reformasi: pemenang, pihak yang dirugikan, dan kompensasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada

kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai politik ekonomi reformasi: pemenang, pihak yang dirugikan, dan kompensasi memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

29. Strategi Implementasi: Portofolio Produktivitas dan SDM

Strategi yang luas hanya berguna apabila diterjemahkan menjadi urutan prioritas, penanggung jawab, indikator, pembiayaan, dan mekanisme pembelajaran.

Indonesia tidak kekurangan dokumen strategi. Tantangannya adalah mengubah agenda luas menjadi portofolio reformasi yang berurutan, dibiayai, dan dapat dievaluasi. Setiap reformasi harus memiliki pemilik, target hasil, milestone, risiko, dan mekanisme eskalasi. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks strategi implementasi: dari daftar kebijakan ke portofolio transformasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Pendekatan portofolio membedakan reformasi fondasi, akselerator, dan perlindungan. Fondasi mencakup data, regulasi, birokrasi, pendidikan dasar, dan fiskal. Akselerator mencakup industri, digital, perdagangan, dan pembiayaan. Perlindungan mencakup jaminan sosial, transisi pekerja, dan lingkungan. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks strategi implementasi: dari daftar kebijakan ke portofolio transformasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika

insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Pilot dapat digunakan, tetapi harus dirancang untuk pembelajaran dan skalabilitas. Program percontohan yang berhasil karena dukungan luar biasa mungkin tidak dapat diperluas. Evaluasi perlu menguji biaya, kapasitas, dan variasi daerah. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks strategi implementasi: dari daftar kebijakan ke portofolio transformasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Dashboard reformasi harus mengukur outcome, bukan aktivitas. Jumlah izin digital bukan tujuan jika waktu dan biaya tetap tinggi. Jumlah peserta pelatihan bukan keberhasilan jika tidak bekerja. Indikator harus disertai audit independen dan publikasi rutin. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks strategi implementasi: dari daftar kebijakan ke portofolio transformasi, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai strategi implementasi: dari daftar kebijakan ke portofolio transformasi memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

30. Prioritas Kebijakan 2026-2030

Dalam horizon 2026-2030, prioritas pertama adalah memperkuat produktivitas perusahaan dan penciptaan kerja formal melalui penyederhanaan regulasi berkualitas, persaingan, pembiayaan, teknologi, dan pengembangan pemasok. Prioritas kedua adalah modal manusia: pembelajaran dasar, vokasi, kesehatan, dan perlindungan transisi. Dari sudut ekonomi mikro,

perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks prioritas reformasi 2026-2030, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Prioritas ketiga adalah kapasitas fiskal dan negara. Administrasi pajak, kualitas belanja, meritokrasi, data, dan koordinasi menentukan kemampuan semua agenda lain. Prioritas keempat adalah konektivitas fisik dan digital yang menurunkan biaya kepulauan. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks prioritas reformasi 2026-2030, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Prioritas kelima adalah transformasi hijau dan ketahanan iklim. Investasi yang dilakukan hari ini akan mengunci struktur energi dan kota selama puluhan tahun. Standar, pembiayaan, dan perlindungan transisi harus dibangun sekarang. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks prioritas reformasi 2026-2030, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Prioritas keenam adalah integrasi global yang selektif dan strategis. Indonesia perlu memanfaatkan pergeseran rantai pasok sambil meningkatkan kandungan pengetahuan domestik. Sasaran bukan sekadar nilai investasi, melainkan produktivitas, ekspor, keterampilan, dan inovasi. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks prioritas reformasi 2026-2030, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus

menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai prioritas reformasi 2026-2030 memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

31. Skenario Indonesia Produktif 2045

Skenario pertama adalah kelanjutan moderat: pertumbuhan bertahan sekitar lima persen, stabilitas terjaga, tetapi produktivitas meningkat lambat. Indonesia menjadi ekonomi besar, namun pendapatan per kapita dan kualitas kerja tertinggal dari aspirasi. Ketimpangan wilayah dan tekanan fiskal tetap besar. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks skenario indonesia 2045, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Skenario kedua adalah reformasi terfragmentasi: beberapa sektor maju cepat, terutama komoditas, digital, dan kawasan tertentu, tetapi keterkaitan domestik lemah. Pertumbuhan meningkat sesaat namun rentan terhadap guncangan, konflik distribusi, dan kerusakan lingkungan. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks skenario indonesia 2045, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Skenario ketiga adalah transformasi inklusif: reformasi regulasi, manusia, fiskal, industri, digital, dan hijau saling memperkuat. Produktivitas naik, pekerjaan formal berkembang, ekspor lebih kompleks, dan daerah memiliki mesin pertumbuhan beragam. Ini bukan hasil satu kebijakan, melainkan konsistensi lintas pemerintahan. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks skenario indonesia 2045, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh

berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Pilihan skenario bukan ramalan, melainkan konsekuensi institusional. Visi Indonesia Emas memerlukan kemampuan mengatakan tidak pada proyek rendah manfaat, menghentikan program gagal, melindungi kelompok terdampak, dan menjaga reformasi dari penangkapan kepentingan. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks skenario Indonesia 2045, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai skenario Indonesia 2045 memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

32. Kerangka Pengukuran Keberhasilan

Keberhasilan reformasi harus diukur dalam lima lapisan: stabilitas, produktivitas, inklusi, ketahanan, dan kapasitas institusi. Stabilitas mencakup inflasi, fiskal, dan keuangan. Produktivitas mencakup TFP, output per pekerja, investasi teknologi, dan kompleksitas ekspor. Dari sudut ekonomi mikro, perubahan tersebut memengaruhi keputusan investasi, perekrutan, inovasi, dan alokasi modal di tingkat perusahaan. Dalam konteks kerangka pengukuran keberhasilan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Inklusi mencakup pekerjaan formal, upah riil, partisipasi perempuan, mobilitas sosial, kemiskinan, dan akses layanan. Ketahanan mencakup diversifikasi, energi, pangan, iklim, serta kemampuan pemulihan. Kapasitas institusi mencakup penerimaan pajak, kualitas regulasi, waktu layanan, pengadaan, dan kepercayaan. Dari sudut ekonomi politik, keberhasilan bergantung pada kemampuan membatasi rente, membangun koalisi, dan memberi kompensasi yang sah kepada kelompok terdampak. Dalam konteks kerangka pengukuran keberhasilan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Indikator harus dipilih menurut wilayah, gender, usia, dan kelompok pendapatan. Rata-rata nasional dapat menyembunyikan ketertinggalan. Data administratif dan survei perlu diintegrasikan dengan perlindungan privasi. Dari sudut kelembagaan, aturan formal hanya efektif apabila kapasitas pelaksana, data, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi tersedia. Dalam konteks kerangka pengukuran keberhasilan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Evaluasi reformasi harus memungkinkan koreksi. Kebijakan tidak perlu dipertahankan demi reputasi jika bukti menunjukkan kegagalan. Budaya belajar merupakan bagian dari kapasitas negara dan kepemimpinan. Dari sudut pemerataan, kebijakan harus diuji terhadap dampaknya bagi pekerja informal, perempuan, pemuda, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Dalam konteks kerangka pengukuran keberhasilan, hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus terlihat pada perubahan perilaku dan hasil ekonomi. Pemerintah perlu membedakan indikator masukan, keluaran, dan dampak; menyediakan baseline; serta menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan. Pengalaman reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan yang tampak sederhana dapat gagal ketika insentif antarlembaga tidak selaras. Oleh sebab itu, desain implementasi harus menyebutkan siapa yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, jadwal, risiko, kebutuhan data, dan cara menangani konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai kerangka pengukuran keberhasilan memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat dinilai dari pengumuman kebijakan semata. Hasil akan ditentukan oleh kualitas desain, konsistensi antaraturan, kapasitas organisasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Indonesia membutuhkan kombinasi antara arah nasional yang tegas dan ruang eksperimen yang bertanggung jawab di tingkat sektor serta daerah. Reformasi harus mengubah insentif sehari-hari: apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang dihargai dalam birokrasi, keterampilan apa yang dipilih warga, dan bagaimana biaya sosial maupun lingkungan diperhitungkan. Dalam

kerangka itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari sistem yang semakin mampu belajar dan mengalokasikan sumber daya, bukan sekadar akibat dorongan sementara.

33. Sintesis: Arsitektur Ekonomi Berbasis Produktivitas Manusia

Produktivitas sebagai hasil sistem

Produktivitas tidak dihasilkan oleh satu kementerian atau satu program. Ia muncul ketika pendidikan, kesehatan, infrastruktur, regulasi, teknologi, manajemen, persaingan, dan pembiayaan membentuk lingkungan yang konsisten. Kelemahan pada satu mata rantai dapat mengurangi manfaat investasi pada mata rantai lain. Sekolah yang baik tidak cukup tanpa pekerjaan bermutu; mesin modern tidak cukup tanpa teknisi; pelatihan tidak cukup tanpa permintaan kompetensi; dan inovasi tidak cukup tanpa pasar serta perlindungan hukum.

Karena itu, strategi nasional harus menggunakan pendekatan portofolio. Program dipilih berdasarkan masalah produktivitas yang hendak dipecahkan, hubungan sebab-akibat, biaya, kapasitas pelaksana, dan waktu hasil. Pemerintah perlu membedakan kebijakan fondasi, seperti gizi dan pendidikan dasar, dari kebijakan akselerasi, seperti digitalisasi perusahaan dan integrasi rantai nilai. Keduanya penting, tetapi horizon dan indikatornya berbeda.

Kontrak sosial produktif

Agenda produktivitas memerlukan legitimasi. Pekerja akan mendukung perubahan teknologi dan fleksibilitas apabila mereka memperoleh perlindungan, kesempatan belajar, dan bagian yang adil dari manfaat. Perusahaan akan berinvestasi apabila aturan stabil dan layanan publik dapat dipercaya. Masyarakat akan menerima reformasi apabila hasilnya terlihat dalam pekerjaan, pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian, produktivitas harus menjadi kontrak sosial, bukan slogan efisiensi sepihak.

Kontrak sosial produktif juga menuntut perhatian pada wilayah tertinggal dan kelompok rentan. Kebijakan universal perlu dilengkapi dukungan yang lebih intensif bagi daerah dengan biaya layanan tinggi, sekolah lemah, atau konektivitas terbatas. Kesetaraan bukan berarti perlakuan identik, melainkan memastikan setiap orang memiliki kesempatan nyata mengembangkan kemampuan.

Kepemimpinan dan pembelajaran kebijakan

Transformasi jangka panjang membutuhkan kepemimpinan yang konsisten melampaui siklus politik. Pemimpin harus mampu menetapkan arah, menjaga disiplin prioritas, mengelola kepentingan, dan mengakui ketidakpastian. Program harus dirancang sebagai hipotesis yang diuji dengan data. Ketika hasil tidak tercapai, responsnya bukan menutupi kegagalan, melainkan memperbaiki desain atau menghentikan program.

Budaya evaluasi harus tumbuh pada pemerintah, perusahaan, sekolah, rumah sakit, dan perguruan tinggi. Data perlu digunakan untuk pembelajaran, bukan hanya pelaporan. Praktik baik harus didokumentasikan dan disebar, sementara inovasi lokal diberi ruang. Dengan demikian, kualitas SDM tidak hanya menjadi sasaran pembangunan, tetapi juga cara pembangunan dikelola.

34. Kesimpulan

Peningkatan ekonomi Indonesia berbasis produktivitas dan kualitas sumber daya manusia merupakan pilihan strategis yang tidak dapat ditunda. Pertumbuhan yang bertumpu pada penambahan modal, konsumsi, komoditas, atau jumlah pekerja memiliki batas. Untuk mencapai pendapatan tinggi, Indonesia harus menghasilkan nilai lebih besar dari setiap jam kerja, unit modal, hektare lahan, kilowatt energi, dan rupiah anggaran. Hal itu hanya mungkin apabila manusia, organisasi, teknologi, dan institusi berkembang bersama.

Kualitas manusia perlu dipahami secara utuh: sehat, terdidik, terampil, berkarakter, kreatif, mampu bekerja sama, dan terus belajar. Kebijakan harus dimulai sejak awal kehidupan dan berlanjut sepanjang karier. Pendidikan dasar membangun fondasi, vokasi dan perguruan tinggi membentuk kompetensi, kesehatan menjaga kapasitas, sedangkan perusahaan dan pasar kerja menyediakan ruang penerapan. Kegagalan menghubungkan tahap-tahap tersebut akan menghasilkan pemborosan talenta.

Produktivitas juga memerlukan transformasi struktur ekonomi. Pekerjaan bernilai tambah tinggi tidak muncul hanya melalui pelatihan; ia membutuhkan investasi, industrialisasi, inovasi, rantai nilai, infrastruktur, dan perusahaan yang bertumbuh. Oleh karena itu, kebijakan SDM dan kebijakan ekonomi harus dirancang sebagai satu agenda. Peta keterampilan harus terhubung dengan strategi sektor dan wilayah, sementara investasi perlu dinilai dari kontribusinya terhadap pembelajaran, pemasok lokal, dan pekerjaan bermutu.

Agenda ini harus inklusif. Produktivitas yang berkelanjutan memperluas kesempatan perempuan, pemuda, pekerja informal, penyandang disabilitas, dan masyarakat di luar pusat pertumbuhan. Teknologi digunakan untuk memperkuat manusia, bukan sekadar menggantikannya. Keuntungan efisiensi harus diterjemahkan menjadi upah riil, layanan publik, inovasi, dan ketahanan sosial. Dengan cara itu, reformasi memperoleh dukungan dan menciptakan lingkaran saling memperkuat antara produktivitas dan kesejahteraan.

Menuju 2045, keberhasilan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar ekonominya, tetapi oleh seberapa tinggi mutu pekerjaan, pengetahuan, kesehatan, institusi, dan martabat manusianya. Ekonomi yang produktif adalah ekonomi yang memungkinkan setiap warga mengembangkan kemampuan dan menyumbangkan nilai. Inilah dasar bagi Indonesia yang maju, adil, tangguh, inovatif, dan berkelanjutan.

35. Glossarium

Bonus demografi: Kondisi ketika proporsi penduduk usia kerja relatif besar dibandingkan penduduk tanggungan; manfaat ekonominya bergantung pada kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan produktif.

Human capital: Pengetahuan, keterampilan, kesehatan, pengalaman, dan atribut lain yang meningkatkan kemampuan manusia menghasilkan nilai.

Kecocokan keterampilan: Tingkat kesesuaian antara kompetensi pekerja dan kebutuhan pekerjaan atau sektor.

Modal manusia: Padanan human capital; kapasitas produktif yang melekat pada manusia dan berkembang melalui pendidikan, kesehatan, serta pengalaman.

Pembelajaran sepanjang hayat: Proses pengembangan pengetahuan dan keterampilan secara terus-menerus sepanjang kehidupan.

Produktivitas tenaga kerja: Nilai output atau nilai tambah yang dihasilkan per pekerja atau per jam kerja.

Produktivitas faktor total: Ukuran efisiensi penggunaan gabungan modal, tenaga kerja, dan input lain, sering dikaitkan dengan teknologi, organisasi, dan institusi.

Reskilling: Pelatihan untuk memperoleh kompetensi baru agar seseorang dapat berpindah tugas atau pekerjaan.

Skill mismatch: Ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dan yang dibutuhkan pekerjaan.

Transformasi struktural: Perubahan komposisi ekonomi dan tenaga kerja dari aktivitas berproduktivitas rendah menuju aktivitas bernilai tambah lebih tinggi.

Upskilling: Peningkatan kompetensi agar pekerja dapat menjalankan tugas yang lebih kompleks atau produktif.

Learning-adjusted years of schooling: Ukuran tahun sekolah yang disesuaikan dengan hasil belajar, sehingga membedakan durasi pendidikan dari kualitas pembelajaran.

Misallocation: Salah alokasi sumber daya ketika modal dan tenaga kerja tidak mengalir ke penggunaan atau perusahaan yang paling produktif.

Pekerjaan bermutu: Pekerjaan yang produktif, aman, memberikan pendapatan layak, perlindungan, kesempatan belajar, dan prospek kemajuan.

Difusi teknologi: Penyebaran dan penerapan teknologi dari pelopor menuju perusahaan, sektor, atau wilayah lain.

36. Daftar Pustaka

- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3-30.
<https://doi.org/10.1257/jep.33.2.3>
- Autor, D. H. (2015). Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3-30.
<https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2025. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026a). Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026b). Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen (y-on-y). BPS-Statistics Indonesia.
- Bloom, N., Eifert, B., Mahajan, A., McKenzie, D., & Roberts, J. (2013). Does management matter? Evidence from India. *Quarterly Journal of Economics*, 128(1), 1-51.
<https://doi.org/10.1093/qje/qjs044>
- Bloom, N., & Van Reenen, J. (2007). Measuring and explaining management practices across firms and countries. *Quarterly Journal of Economics*, 122(4), 1351-1408.
<https://doi.org/10.1162/qjec.2007.122.4.1351>
- Cirera, X., & Maloney, W. F. (2017). The innovation paradox: Developing-country capabilities and the unrealized promise of technological catch-up. World Bank.
<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1160-9>

- Deming, D. J. (2017). The growing importance of social skills in the labor market. *Quarterly Journal of Economics*, 132(4), 1593-1640. <https://doi.org/10.1093/qje/qjx022>
- Dabla-Norris, E., Ho, G., Kochhar, K., Kyobe, A., & Tchaidze, R. (2013). Anchoring growth: The importance of productivity-enhancing reforms in emerging market and developing economies. *IMF Staff Discussion Note*, 13/08. <https://doi.org/10.5089/9781484384954.006>
- Gennaioli, N., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2013). Human capital and regional development. *Quarterly Journal of Economics*, 128(1), 105-164. <https://doi.org/10.1093/qje/qjs050>
- Hall, R. E., & Jones, C. I. (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others? *Quarterly Journal of Economics*, 114(1), 83-116. <https://doi.org/10.1162/003355399555954>
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2008). The role of cognitive skills in economic development. *Journal of Economic Literature*, 46(3), 607-668. <https://doi.org/10.1257/jel.46.3.607>
- Hsieh, C.-T., & Klenow, P. J. (2009). Misallocation and manufacturing TFP in China and India. *Quarterly Journal of Economics*, 124(4), 1403-1448. <https://doi.org/10.1162/qjec.2009.124.4.1403>
- International Monetary Fund. (2026). Indonesia: 2025 Article IV consultation—Press release; staff report; and statement by the Executive Director for Indonesia. *IMF Country Report No. 2026/010*. <https://doi.org/10.5089/9798229035576.002>
- Lucas, R. E., Jr. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3-42. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(88\)90168-7](https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7)
- McMillan, M., Rodrik, D., & Verduzco-Gallo, I. (2014). Globalization, structural change, and productivity growth, with an update on Africa. *World Development*, 63, 11-32. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.10.012>
- OECD. (2024a). *OECD economic surveys: Indonesia 2024*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/de87555a-en>
- OECD. (2024b). *Transforming education in Indonesia: Examining the landscape of current reforms*. OECD Education Policy Perspectives, No. 88. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9ff8d407-en>
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 2), S71-S102. <https://doi.org/10.1086/261725>
- Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21(1), 1-33. <https://doi.org/10.1007/s10887-015-9122-3>
- Syverson, C. (2011). What determines productivity? *Journal of Economic Literature*, 49(2), 326-365. <https://doi.org/10.1257/jel.49.2.326>
- World Bank. (2020). *The human capital index 2020 update: Human capital in the time of COVID-19*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/34432>
- World Bank. (2025). *Indonesia economic prospects: Digital foundations for growth*. World Bank.
- World Bank. (2026). *Indonesia economic prospects: Managing risks, unlocking productivity*. World Bank.